

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN  
RISIKO DALAM *GADUH* KAMBING**

(Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**Nur Laela Widayanti**

**NPM. 1721030335**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN  
RISIKO DALAM GADUH KAMBING**

(Studi Kasus Di Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh

**Nur Laela Widayanti**

**NPM 1721030335**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

*Gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pemelihara ternak dengan imbalan bagi hasil yang sudah disepakati. Dalam *gaduh* kambing ini terdapat dua pihak yakni, pihak pertama sebagai pemilik modal/pemilik kambing (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pemelihara kambing (*Mudharib*). Penanggung risiko yang dibebankan kepada pemelihara kambing (*Mudharib*) terhadap pemilik modal/pemilik kambing (*Shahibul maal*) apabila kambing tersebut hilang karena kemalingan atau hal lain seperti berkeliaran hingga tidak pulang kekandang. Sedangkan apabila kambing tersebut sakit sehingga mengeluarkan biaya pengobatan maka pihak pemelihara kambing (pemelihara kambing) harus bertanggung jawab penuh berupa biaya pengobatan ditanggung oleh pihak pemelihara kambing (pemelihara kambing). Bagi hasil dalam perjanjian ini dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal/pemilik kambing (*shahibul maal*) dan 50% (lima puluh persen) untuk pemelihara kambing (*Mudharib*) dan risiko akan di tanggung bersama-sama. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penanggung Risiko Dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?, Bagaimana Sistem Bagi Hasil Pada *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggung Risiko dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kerja sama yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Dalam analisa datanya menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui *editing*, dan *sistematis data*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan Penanggung Risiko tidak sesuai dengan Teori Mudharabah karena pemelihara kambing (*Mudharib*) lebih banyak menanggung risiko. Pelaksanaan pembagian keuntungan pada kerja sama *gaduh* kambing di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji tidak sesuai dengan Teori Mudharabah karena pada akad awal pembagiannya pemilik kambing (*Shahibul Maal*) mendapat 50% dan pemelihara kambing (*Mudharib*) mendapat 50% akan tetapi diakhir pembagian pemilik kambing (*Shohibul maal*) mendapat 60% dan pemelihara kambing (*Mhudarib*) mendapat 40%. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggung Risiko dalam *Gaduh* Kambing studi di Desa Margo Bhakti, bahwa pembagian keuntungan dan penanggung risiko dalam sistem *gaduh* kambing ini tidak sejalan dengan Hukum Islam karena menyimpang dari Teori Mudharabah dan pemilik kambing (*Shahibul Maal*) mengingkari akad awal yang sudah disepakati bersama-sama.

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Laela Widayanti

NPM : 1721030335

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

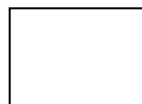
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUGAN RISIKO DALAM *GADUH* KAMBING (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada menyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2021  
Penulis



Nur Laela Widayanti  
NPM. 1721030335







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan  
Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi di Desa Margo  
Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**  
**Nama : Nur Laela Widayanti**  
**NPM : 1721030335**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan : Muamalah**

**MENYETUJUI**

**Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, SH., M.Hum.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)"** disusun oleh **Nur Laela Widayanti** Npm **1721030335** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 06 September 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua : Marwin, SH., MH**

  
(.....)

**Sekretaris : Muslim, SHL., MHI**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**

  
(.....)

**Penguji II : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**

  
(.....)

**Penguji III : Eti Karini, SH., M.Hum.**

  
(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

  
**Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَا زَهُ (رواه البيهقي)

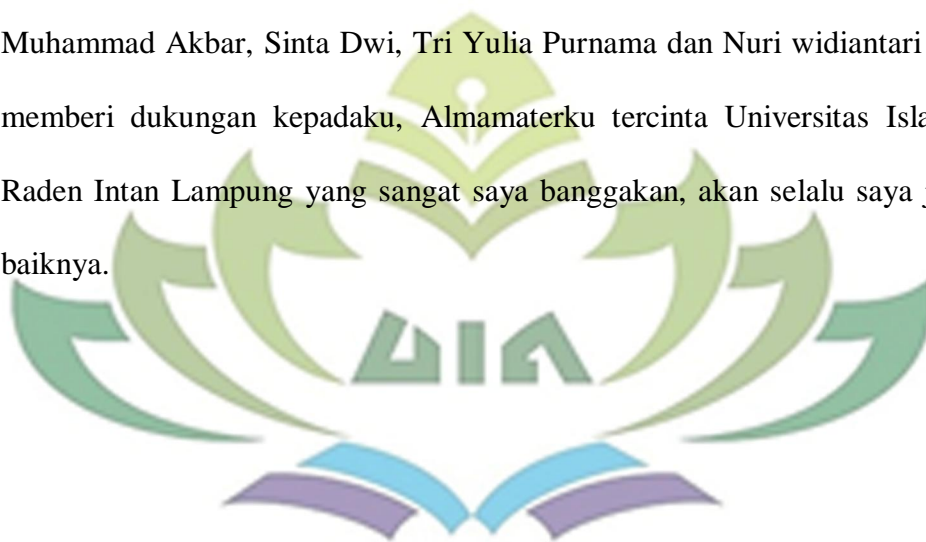
“Dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dana itu tidak dibawa mengurungi lautan,menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak.Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw.Pun, memperbolehkannya.”

(HR. Imam Baihaqi)



## PERSEMABAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahku Bapak Alm.Sholikin, Bapak Alim dan Ibuku tercinta Ibu Siti Khoiriyah, terima kasih yang tak terhingga ayah, ibu atas do'a, semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya, kepada Ayah dan Ibu, kakek Pak Khusnan. Adik Muhammad Akbar, Sinta Dwi, Tri Yulia Purnama dan Nuri widiantari yang juga memberi dukungan kepadaku, Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.





## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Nur Laela Widayanti, dilahirkan di Mesuji pada tanggal 21 Desember 1998, anak pertama dari pasangan (Sholikin) dan (Siti Khoiriyah). Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Bratasena Mandiri Kecamatan Dente Teladas dan selesai pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bratasena Mandiri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Way Serdang Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan selesai pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

Yang Membuat,

Nur Laela Widayanti

## KATA PENGANTAR

*Bismilla hirohmanirrohim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, sebagai persyaratan ujian munaqasah guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin risyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN RISIKO DALAM GADUH KAMBING”** (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji) dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selanjutnya untuk keberhasilan itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnsya dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;

2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoirudin, M.S.I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Eti Karrini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Sya'riah dan segenap Tenaga Kependidikan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pemelihara kambing perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

Nur Laela Widayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi & Batasan Masalah .....	5
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	10



J. Sistematika Pembahasan.....	14
--------------------------------	----

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Mudharabah</i> .....	16
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	20
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	27
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	33
5. Prinsip-prinsip <i>Mudharabah</i> .....	38
6. Hak dan Kewajiban Pemelihara kambing .....	40
7. Kedudukan <i>Mudharabah</i> .....	43
8. Hal-hal yang membatalkan <i>Mudharabah</i> .....	44
9. Manfaat dan Hikmah <i>Mudharabah</i> .....	47
B. Risiko.....	49
1. Pengertian Risiko.....	49
2. Sebab Timbulnya Risiko .....	52
3. Tipe Risiko .....	53
4. Mengelola Risiko .....	55

## **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

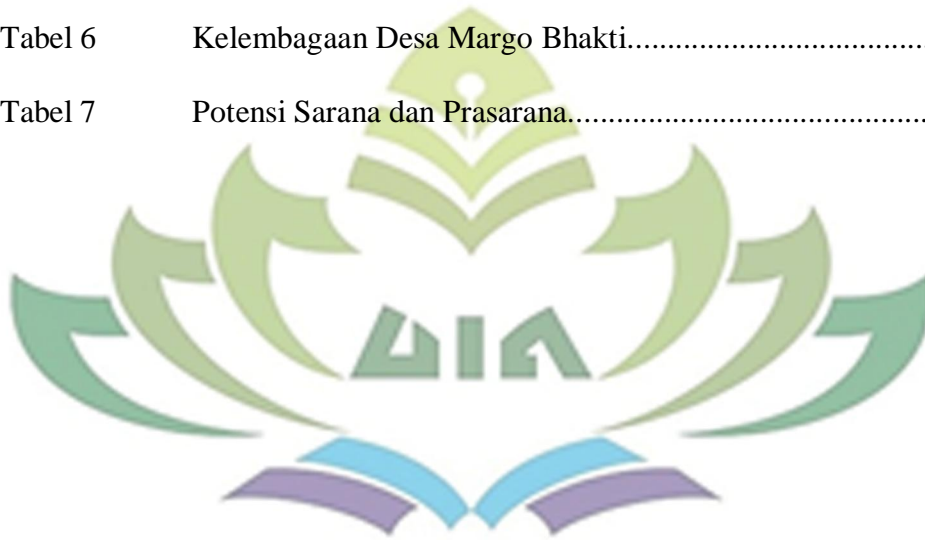
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
1. Sejarah Singkat Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	56
2. Visi dan Misi Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	56

3. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Margo Bhakti	
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	58
4. Kondisi Demografis Desa Margo Bhakti	
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	59
5. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Margo Bhakti	
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	60
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margo Bhakti	
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	62
B. Praktik Penanggungan Risiko Dalam <i>Gaduh</i> Kambing	
di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang	
Kabupaten Mesuji.....	65
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Praktik Penanggungan Risiko Dalam <i>Gaduh</i> Kambing di Desa Margo	
Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.....	71
B. Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama <i>Gaduh</i> kambing di Desa Margo	
Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.....	72
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam <i>Gaduh</i>	
kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang	
Kabupaten Mesuji.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Desa Margo Bhakti.....	59
Tabel 2	Topologi Desa Margo Bhakti.....	60
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margo Bhakti.....	61
Tabel 4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Margo Bhakti.....	62
Tabel 5	Tenaga Medis Kesehatan.....	62
Tabel 6	Kelembagaan Desa Margo Bhakti.....	63
Tabel 7	Potensi Sarana dan Prasarana.....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margo Bhakti

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....64





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
2. Teks Wawancara dengan pemilik kambing (*shohibul mal*)
3. Teks Wawancara dengan pemelihara kambing kambing (*mudharib*)
4. Dokumentasi Foto Penelitian
5. Blangko Konsultasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan skripsi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan serta kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul Skripsi yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**. Maka perlu dikemukakan istilah kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya); perbuatan meninjau.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-quran maupun as-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.
3. Penanggungan risiko merupakan kegiatan untuk menghindari dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan pemasaran misalnya, turunnya kualitas dan melesunya pasar dan lain-lain.
4. *Gaduh* kambing adalah sistem bagi hasil dalam peternakan kambing (biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk penggaduh).

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016. h. 138

## B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah ad-din (agama) dan mabda' (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rosul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi. Manusia di jadikan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lain untuk dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan. Maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalat. Kemudian salah satu bentuk dari bermuamalat yaitu kerja sama.<sup>2</sup>

Dalam hukum muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mudharabah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Kata akad berasal dari bahasa arab yang berarti mengikat, menetapkan, membangun dan lawan dari melepaskan, kata akad berarti janji, perjanjian dan kontrak.<sup>3</sup> Sedangkan akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan berkembang dari keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>4</sup> Pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Edisi pertama Jakarta: PT. fajar Interpretama Mandiri, 2012. H. 75

<sup>3</sup> Maksum Muhammad, "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah," *Al-Adalah* XII, no. Jalan Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten 2014. h.50.

<sup>4</sup> Asri Jumaidi Hidayat Arif, "Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah Dan Musaqah," 2016. h. 23

pemelihara kambing harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan pemodal kepadanya.

Bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pihak pemelihara kambing (*mudharib*) telah dikenal sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammas Saw berprofesi sebagai pedagang, is melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi Hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Masyarakat Desa Margo Bhakti kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh dan sebagain dari masyarakat menjalankan praktik kerja sama bagi hasil dalam bidang peternakan kambing guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Di Margo Bhakti pada praktik bagi hasil peternakan kambing dikenal dengan istilah *gaduh* kambing. *Gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pemelihara kambing dengan imbalan bagi hasil yang sudah disepakati. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin membeli kambing namun tidak mempunyai kandang dan waktu yang cukup untuk memelihara kambing, sebaliknya ada beberapa orang yang memiliki modal yang cukup untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan saja



tapi juga saling tolong menolong antara pemilik modal/pemilik kambing (*shahibul mal*) dan pemelihara kambing (*Mudharib*).

Penanggungan risiko yang dibebankan kepada pemelihara kambing (*Mudharib*) terhadap pemilik modal/pemilik kambing (*Shahibul maal*) apabila kambing tersebut hilang karena kemalingan atau ma hal lain seperti berkeliaran hingga tidak pulang kekandang. Sedangkan apabila kambing tersebut sakit sehingga mengeluarkan biaya pengobatan maka pihak pemelihara kambing (pemelihara kambing) harus bertanggung jawab penuh berupa biaya pengobatan ditanggung oleh pihak pemelihara kambing (pemelihara kambing). Selain itu juga bentuk risiko yang akan di alami pada sektor bisnis : produk yang dihasilkan rawan terhadap penyakit, membutuhkan perawatan yang intensif dan itu harus dilakukan berkala, yaitu termasuk dengan menggunakan dokter hewan untuk mengecek agar hewan ternak selalu dalam keadaan baik, kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak ke depan serta harga jualnya di pasaran.<sup>5</sup>

pemilik modal (*shahibul Maal*) dan pemelihara kambing (*mudharib*) hanya melakukan akad dengan lisan. Pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pemelihara kambing (*mudharib*) 50:50 atau 50% untuk pemilik modal (*shahibul Maal*) dan 50% untuk pemelihara kambing (*mudharib*) pada kesepakatan di awal, Akan tetapi ketika di akhir pembagian keuntungannya berubah menjadi 60:40 atau 60% untuk pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan 40% untuk pemelihara kambing (*Mudharib*), Itu lah yang menjadi risiko pemelihara kambing (*mudharib*). Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat umumnya, seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis

---

<sup>5</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi* Bandung: Alfabeta, 2016. h. 2

bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan suatu akad didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan peneliti. Maka suatu informasi dilapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terletak pada Penanggungan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing studi di Desa Margo Bhakti ditinjau dari Hukum Islam.

### D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian atau research yang bertujuan untuk menemukan suatu hal baru, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penulisan.<sup>6</sup>

Adapun fokus penelitian pada skripsi terletak pada penanggungan risiko yang ditanggung oleh penggaduh kambing yang akan ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan sistem bagi hasil *gaduh* kambing. kemudian lokasi untuk melakukan penelitian ini terletak di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way

---

<sup>6</sup> Sattar, “Buku Ajar Pengantar Bisnis,” 2017. h. 61

Serdang Kabupaten Mesuji. Sub-fokus penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penanggungan risiko dalam *gaduh* kambing di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

#### **E. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggungan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat di tentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Penanggungan Risiko dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- b. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil dalam *Gaduh* kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan

Way Serdang Kabupaten Mesuji.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penanggungan risiko terhadap *gaduh* kambing.
- b. Secara praktis
  - 1) Untuk mengetahui secara ril bagaimana penanggungan risiko terhadap *gaduh* kambing di desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
  - 2) Untuk mengetahui secara ril bagaimana sistem bagi hasil dalam *gaduh* kambing di desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
  - 3) Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran penyusun khususnya dalam bidang fiqh muamalah.
  - 4) Untuk memberikan sumbangan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap pelaksanaan penanggungan risiko terhadap *gaduh* kambing di desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.



### G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Signifikasi secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang terlibat dalam pelaksanaan sistem bagi hasil dalam kerja sama *gaduh* kambing, serta mampu memberikan pemahaman sesuai Hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas peraturan yang berlaku di dalam Hukum Islam maupun hukum positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti, khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan mengenai penanggungan risiko di antaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Badriah membahas tentang “Bagi Hasil Pada Sistem *Gaduh* Kambing Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. (Studi Kasus di Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih). Jurnal

ini membahas tentang sistem bagi hasil ke pada dua belah pihak. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh* kambing ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Terhadap penanggungan risiko yang mungkin terjadi dalam sistem *gaduh* ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Putroe Tisara Mentari yang berjudul “Penanggungan Risiko Pada Pemesanan Makanan Via GO-FOOD di Banda Aceh dalam Persepektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Study Kasus Gojek Di Banda Aceh) dengan permasalahan fokus pada risiko yang muncul akibat pemesanan GO-FOOD yang dibatalkan secara sepihak setelah order oleh konsumen. Kesimpulan dari permasalahan ini bahwa penanggungan risiko pada pemesanan makanan via GO-FOOD di Banda Aceh tidak sejalan dengan akad Ijarah Bi Al-Amal karena konsumen mengingkari akad secara sepihak saja.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Heni Wahyuni, Skripsi ini membahas tentang “Praktek Nggadoh Kambing di desa Semangung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum adat”. Dengan permasalahan praktik *nggadoh* kambing di desa Semangung sesuai dengan praktik akad *mudharabah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai

dengan konsep Hukum Islam, yaitu modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil.

Bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Dalam *Gaduh* Kambing” (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji) akan fokus membahas pada penanggungan risiko yang ditanggungan kepada pemelihara kambing (*Mudharib*) yang harus mengganti rugi kambing yang hilang /mati, pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan akad di awal.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, karena menggunakan metode kualitatif serta pendekatan induktif lebih relevan dengan penelitian ini dalam pengolahan datanya. Sedangkan untuk membuat gambaran penelitian yang baik, maka memerlukan langkah-langkah yang tersistematis.<sup>7</sup> Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abu Achmadi Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2008. h.

<sup>8</sup> Kartono Kartini, “Pengantar Metodologi Riset Sosial,” Bandung : Mandar Maju, 1986.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.

## 2. Sumber data

a. Data primer

Data primer Merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari orang yang dijadikan narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data di peroleh dari teori-teori dan norma hukum diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa.<sup>9</sup>

## 3. Populasi dan Sempel

Populasi yaitu sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama, atau himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 5 Orang sebagai pihak *Shohibul mal* sedangkan pihak lain sebagai *Mudharib*, di Desa Margobakti, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Dengan demikian seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga peneliti ini termasuk peneliti populasi.

---

<sup>9</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung : pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015. h. 23

#### 4. Metode pengumpulan data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan dan mencatat secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.<sup>10</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan praktik penanggulangan risiko dalam *gaduh* kambing di Desa Margo Bhakti, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang faktual. Menarik serta menambah kepribadian individu (kepekaan).

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai suatu hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>11</sup> Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data di lapangan.

##### c. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi yang aman sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas

<sup>10</sup> Ashshofa Burhan, "Metode Penelitian Hukum," Jakarta : Rineka Cipta, 2013. h. 31

<sup>11</sup> Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1993. h. 47

fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan Penanggungungan Risiko dalam *Gaduh Kambing Studi* di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang di peroleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>12</sup>

### b. Sistematikasi Data

Bertujuan untuk merapikan dan memposisikan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>13</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis

<sup>12</sup> Ashshofa Burhan, "Metode Penelitian Hukum." h. 38

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Abidin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006. h.29



secara kualitatif. Metode analisis data adalah suatu metode yang mana data yang diperoleh dan diolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dipahami untuk menjawab masalah-masalah yang ada.

Adapun penelitian ini menggunakan metode induktif, cara berfikir induktif adalah metode analisis data dengan cara dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis menyusun menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian isi dalam penelitian ini, penulis menyusun kedalam lima bab yang rincinya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah yang mendasari terjadinya penelitian ini, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini menguraikan teori tentang *Mudharabah* dan teori Risiko.

BAB III Deskripsi Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya desa, visi misi desa, letak geografis dan demografis, struktur organisasi desa, keadaan sosial ekonomi desa, pelaksanaan penanggulangan

Risiko dalam *gaduh* kambing di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

BAB IV Analisis penelitian, pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil kesimpulan intisari skripsi ini yaitu berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Tentang *Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah.<sup>1</sup> *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>2</sup>

Menurut bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fi ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.<sup>3</sup> Secara terminologi *mudharabah* adalah menyerahkan harta yang tertukar kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.<sup>4</sup> Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti

---

<sup>1</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.204.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.223.

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.205.

<sup>4</sup> Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h.614.

berjalan di atas bumi yang bisa diartikan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa ayat 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kamu berpergian di Muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu men-qashar sholat.”<sup>5</sup> (QS. An Nisa: 101)

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.<sup>7</sup>

Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul*

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.195.

<sup>6</sup> M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.138.

*mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).<sup>8</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikad akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan : modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.<sup>9</sup>

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal.<sup>10</sup>

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal.<sup>11</sup> *Mudharabah* diambil dari lafaz *al-Drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.141.

<sup>9</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.90.

<sup>10</sup> Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.6.

<sup>11</sup> Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.63.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h.107.

Setelah diketahui beberapa pengetahuan yang dijelaskan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>13</sup> Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk nisbah (presentase).<sup>14</sup>

Sebagai suatu bentuk kontak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal/dana (pemodal), bisa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.136

<sup>14</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...., h.224

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.60.



## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut berkembang, dan sebaliknya ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mampu mengembangkan harta. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaat.

Banyak ayat al-Quran dan hadist Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, pertanian, perkebunan, peternakan serta pengolahan makan dan minum. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantaranya pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan

seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut. Adapun dasar hukum yang disyari'atkan dalam Islam adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 disebutkan:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”*<sup>16</sup> (QS. Al-Muzammil:20)

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198 disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”* (QS. Al-Baqarah:198)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rizki dari Tuhan kalian untuk mengambil keuntungan dari perniagaan pada hari-hari haji.<sup>17</sup> Kalimat ini memberikan perasaan kepada orang yang melakukannya bahwa ia sedang mencari karunia Allah ketika ia berdagang, bekerja, dan ketika mencari sebab-sebab rezeki kepada dirinya dengan pekerjaan. Tetapi ia hanya mencari karunia dari Allah, lalu Allah memberikannya. Oleh karena itu, patutlah baginya untuk tidak melakukan hakikat ini, yaitu bahwa ia mencari karunia Allah. Ia akan mendapatkan karunia ini ketika

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), h.82.

<sup>17</sup> Syaihk Al-alamah, Shalih Bin Muhammad Alu asy-Syakh, *Tafsir Muyassah*, (Jakarta:Darul Haq, 2016), h.93.

berusaha dan bekerja, dan memperoleh rezekinya melalui sebab-sebab yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki.<sup>18</sup>

c) Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>19</sup> (QS.Al-Jumu'ah:10)*

Maksud dari ayat di atas adalah apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau oleh (dan carilah) rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung, yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jumat, Nabi Saw. berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukulan gendrang menyambut kedatangan sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu kecuali hanya dua belas orang saja masih tetap bersama nabi saw. lalu turunlah ayat ini.<sup>20</sup>

Hubungan ketiga ayat di atas adalah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau bisnis lainnya seperti usaha yang ada pada sistem bagi hasil *mudharabah* dan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*...., h. 554

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>20</sup> Al-Imam Jalaludin Muhammad, et. Al., *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: PT. Elbah Mandiri Sejahtera), h,781.

*syirkah* salah satunya. Selain itu, Al-Quran tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah* melainkan melalui hasil kata Arab yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah kemudian mengalami konsep *mudharabah*, meskipun tidak disangkal bahwa *mudharabah* suatu perjalanan jauh yang bertujuan bisnis dan mencari keuntungan.<sup>21</sup> Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerja sama berdasarkan prinsip ini.

b. Hadis

Hadis dibawah ini menjelaskan tentang *Mudharabah*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)<sup>22</sup>

“Dari Shuhaib,ra: bahwasannya Rasulullah Saw.bersabda : “Ada tiga hal yangdi dalamnya berisi berkah,yaitu: jual beli dengan kontan, menyerahkan pemrmodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)”.

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa *mudharabah* bukan hanya dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya, *shahibul mal* dengan hartanya dan *mudharib* dengan tenaga dan waktunya. Apabila terjadi keuntungan keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan.

<sup>21</sup> Asad Muhammad, *The Message of the Quran*, (Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985), h.92

<sup>22</sup> Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT. Raja grpindo Persada,2016) h.152

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه البيهقي)

“Dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dana itu tidak dibawa mengurungi lautan,menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak.Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Pun memperbolehkannya”. (HR. Imam Baihaqi)

Maksud dari hadits di atas adalah mengacu pada *Mudharabah Muqayyadah* (terikat), penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu,dan lain-lain. Dan apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan.<sup>23</sup>

#### c. Ijma

Ibn Taymiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma* yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal dikalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih dikalangan suku Quraish. Mayoritas orang Arab bergelut dibidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para pengelola. Rasulullah Saw. pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga

<sup>23</sup> *Ibid*

pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.<sup>24</sup>

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip dari Dr.Wahbah Zulaihi ulama dari kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah atau menolak. Beliau itu antara lain Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amir dan Aisyah.<sup>25</sup> Jika praktik sahabat suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggah, maka hal itu merupakan ijma. Ketentuan ijma ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.

Para sahabat telah menyerahkan harta para anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi Ijma. Oleh karena itu, *mudharabah* ini telah dipraktikan sejak zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada seorang pun yang menolaknya. Dan Ijma (kesepakatan) setiap masa adalah hujjah<sup>26</sup>. *Mudharabah*

<sup>24</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...., h.226

<sup>25</sup> Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.154

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.162



disyariatkan berdasarkan Ijma (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling menegah dalam hal kemungkaran.

d. Qiyas

*Mudharabah* qiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang kaya dan ada pula yang fakir, dan di antara masyarakat ada yang mempunyai modal, namun ia tidak memiliki keahlian dalam berbisnis atau mengelola modalnya tersebut, dan sebaliknya ada masyarakat yang tidak mempunyai modal, namun ia mempunyai keahlian dalam berbisnis, maka keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu, disyariatkannya *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.<sup>27</sup>

e. Fikih Kaidah

الأَصْلُ فِي الْعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h.155.

yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelsihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.<sup>29</sup>

Menurut ulama Syafiiyah<sup>30</sup> rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul mal*).
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut ulama Malikiyah ada beberapa rukun *mudharabah*, yaitu :

- a. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- b. Amal.
- c. Laba adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- d. Pihak yang mengadakan perjanjian.

<sup>28</sup> Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqiyyah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), h.53.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....,h.226.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.139.

e. Sighat (ijab dan qabul).

Menurut Abdullah Al-Muslih<sup>31</sup>, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu :

a. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak adalah investor dan pengelola modal. keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

b. Objek akad

Objek akad dalam rangka kerjasama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

c. Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas itulah hitung-hitungan dianggap selesai untuk masa kemudian.

d. Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan

---

<sup>31</sup> Abdullah Al-Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.170-178.

kesepakatan ulama seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

e. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah sebagian, sehingga kerjasama harus diberhentikan. Lebih rusak lagi dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba.<sup>32</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3, yaitu: *'aqidyni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nadirsyah Hawari, 2010), h.259.

<sup>33</sup> Abu Hazam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.3.

Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah, keuntungan, dan *shighat* atau akad.

#### 1. Pemodal dan Pengelola

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan wafil dari masing-masing pihak.
- c. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.<sup>34</sup>

#### 2. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus<sup>35</sup> :

- a. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya ( yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
- b. Harus berbenuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan misalnya *inventory*).

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h.175.

<sup>35</sup> *Ibid*, h.175.

- c. Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

### 3. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itulah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terikat dengan usaha penanaman modal karena itu berarti memusyawarahkan antara usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu



oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.

- c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, tetapi agar hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

Keuntungan adalah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c. Rasio presentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d. Waktu pembagian keuntungannya dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul mal*.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Modal harus tunai.
- b. Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- c. Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas persentasenya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
- d. *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain.

#### 4. Macam-Macam *Mudharabah*

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh pengusaha, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah macam-macam dari *mudharabah* :

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah al-muthlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. *Sahib al-mal* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada *mudharib*. Misalnya *shahibul mal* berkata,

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.218-219.

“saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”<sup>37</sup>

Dalam akad *mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.<sup>38</sup>

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.<sup>39</sup> Tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan

<sup>37</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 227

<sup>38</sup> Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah UIN RIL., Vol.XII, No.3, Juni 2015), h.495.

<sup>39</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.1197.

untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.<sup>40</sup>

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- a) pendapatan atau keuangan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- b) Pemilik akad tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- c) Penetapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- d) Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- e) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6 atau 12 bulan.

---

<sup>40</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.149.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

*Mudharabah Muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*ristriced*), pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.<sup>42</sup>

Jika *mudharabah* dilaksanakan dengan batasan tempat, maka *mudharib* tidak boleh bekerja selain di tempat yang sudah disyaratkan oleh *shahibul mal*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahal nya barang yang dimiliki suatu resiko perjalanannya.<sup>43</sup> Jika pemilik

<sup>41</sup> *Ibid*, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.227.

<sup>42</sup> Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.52.

<sup>43</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.501.

modal berkata, “ dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya,” maka syarat (batasan) tersebut adalah sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena syarat itu dapat memberi faedah untuk menambah kepercayaan kepadanya dalam muamalah.<sup>44</sup>

Apabila pemilik modal menentukan waktu *mudharabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad tersebut sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*) maka waktu *mudharabah* menjadi tertentu dengan adanya batasan tersebut.<sup>45</sup>

Pada *mudharabah muqayyad*, terdapat hak-hak *mudharib* yang harus dipenuhi oleh shahibul mal. Sejumlah ulama seperti Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya baik ketika menetap maupun sedang berpergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Shi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya ketika sedang berpergian dan tidak berhak saat sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari *mudharabah*. Biaya tersebut mencakup seperti apa yang dibutuhkan oleh *mudharib* seperti makanan dan pakaian.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h.502.

<sup>45</sup> *Ibid*, h.503.

<sup>46</sup> *Ibid*



## 5. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip *mudharabah* tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidak mekanisme dalam *mudharabah* sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah* artinya, bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibenarkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama ia melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>47</sup>
- b. Prinsip sukarela tanpa paksaan, akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh ada salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan juga salah satu cara untuk mengekplotir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya

---

<sup>47</sup> Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h.10.

kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.<sup>48</sup>

- c. Prinsip mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemudharatan sebagai makhluk sosial, kebutuhan dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membantu orang lain dengan jalan memberikan modal yang ia miliki kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dari orang lain yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikan. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat membantu dengan adanya kerjasama tersebut. pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

- d. Prinsip keadilan sifat semangat, kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan

---

<sup>48</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.14.

ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>49</sup>

#### 6. Hak dan Kewajiban *Shahibul mall* dan *Mudharib*

##### a. Hak dan Kewajiban Pemilik modal<sup>50</sup> :

- 1) Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
- 2) Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pengelola.
- 3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
- 4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
- 5) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama.
- 6) Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

<sup>49</sup> Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah Juz II*, (Mesir: Tiariyah Qubra, 2000), h.48

<sup>50</sup> Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>, diakses 18 Februari 2021.

## b. Hak dan Kewajiban Pengelola

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hal dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafe'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian. keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukumnya fasid.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan, maupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

Menurut Hanafi'yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi : makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku dikhalayak umum.

Biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan dikurangi dari aset *shahibul mall* dan dihitung dari kerugian. Jika *mudharib* melakukan perjalanan bisnis diambil dari aset *mudharabah*. Ketika ia kembali, jika terdapat biaya sisa perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset *mudharabah*. Jika *mudharabah* menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi untung dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah*.

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diserahkan *shahibul mall* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Hanafi'yah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mall*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibul mall*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., h. 144-155.

## 7. Kedudukan *Mudharabah*

Kedudukan *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keahliannya. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih* (objek *wakalah*). Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut kedudukannya sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menanggungnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan akad, *mudharabah* terdiri dari dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan

---

<sup>52</sup> *Ibid* , Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.12.



yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabir*.<sup>53</sup>

#### 8. Hal-hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

*Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal (*shahibul mal*) meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.

Disisi lain, Zuhaily mengatakan *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menawarkan kepada orang lain

---

<sup>53</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *alFiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qolam, t.th), h.42.

<sup>54</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudarabah`Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.76.

sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahibul mal*, *shahibul mal* harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang disewa tenaganya) dan *mudharib* berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian.<sup>55</sup>

Selain ini dalam buku Rachmat Syafe'i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. *Mudharib* diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah seorang *akid* meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang *akid* meninggal dunia, baik pemilik

---

<sup>55</sup>*Ibid*, Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.148.

modal maupun pengelola. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah seorang akid gila, jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik modal *murtad*. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal ini menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan diantara para ahli warisnya.

e. Modal rusak ditangan pengelola. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengelola.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...,h.2237.

## 9. Manfaat dan Hikmah *Mudharabah*

### a. Manfaat *mudharabah*

#### 1) Bagi *mudharib*<sup>57</sup>

a) *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.

b) *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap di awal. Biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan.

c) *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai.

#### 2) Bagi *Shahibul ma*<sup>58</sup>

a) Mendapatkan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena, kalau tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam kemiskinan. Akan tetapi pengelola harus memiliki keahlian dalam bekerja, agar keduanya saling bertukar kepentingan.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.138.

<sup>58</sup> *Ibid*

- b) Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Hikmah *Mudharabah*

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dalam bentuk kerjasama, seperti halnya *qiradh* atau *mudharabah*. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifitaskannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>59</sup>

Apabila Islam memusnahkan dan mencintai orang meng *qiradh* kan, makan dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* atau *mudharabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala.

Jadi, hikmah di syariatkannya *mudharabah* agar manusia dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan, karena hal itu juga termasuk saling tolong-menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadist yang sanatnya dari Abu Hurairah yang artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Berkata, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

---

<sup>59</sup>Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renasian, 2005), h.39.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي  
عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>60</sup>

*“Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)*

*Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki oleh syar’i yang Maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kekafiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.<sup>61</sup>

## B. Risiko

### 1. Pengertian Risiko

Ada berbagai macam definisi mengenai risiko. Norken (2015) mengemukakan risiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya dan kualitas. Risiko juga dapat diartikan sebagai kerugian akibat dari munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan. Kejadian yang

<sup>60</sup> Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h.313.

<sup>61</sup> *Ibid*, h.315.



tidak diharapkan ini bisa muncul dari berbagai sumber (Sunaryo, 2007). Menurut Labombang (2011) risiko adalah variasi hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar hal yang diharapkan yang mengancam keuntungan property dan keuntungan financial akibat bahaya yang terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar hal yang diharapkan yang mengancam keuangan properti dan keuntungan financial akibat bahaya yang terjadi.

Menurut Vaughan (1978) ada 3 definisi risiko yakni :

- 1) *Risk is the Chance of Loss* (risiko adalah peluang terjadinya kerugian).
- 2) *Risk is the Possibility* (risiko adalah kemungkinan kerugian).
- 3) *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian).<sup>62</sup>

Definisi risiko adalah ketidakmungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat adanya ketidakpastian yang tidak diinginkan dengan demikian risiko mempunyai karakteristik :

- a) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b) Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dalam sumber yang berbeda dijelaskan bahwa risiko adalah bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank, risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi

---

<sup>62</sup> Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, (Yogyakarta: ANDI, 2010),

dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa yang terjadi disertai konsekuensi dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi dengan dampak yang member peluang untung atau mengancam sebuah kesuksesan.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan baik, sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.

Risiko diidefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negative serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negative, kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian financial maupun non finansial.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu dan adanya juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya

keuntungan atau kerugian pada seorang institusi tersebut.<sup>63</sup>

## 2. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan, risiko secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Peristiwa atau sebab-sebab peristiwa timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.

Menurut Isno Djojosoedarso, risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) dan ketidakpastian ekonomi (*human uncertainty*).

- a. Ketidakpastian ekonomi (*uncertainty*) yang dimaksud adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sifat, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologi.
- b. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dihindari seperti badai, banjir,

---

<sup>63</sup> Irham Fahmi. *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2.

gempa dan lain-lain.

- c. Ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atas suatu kondisi atau keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut mengakibatkan keraguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi dimasa depan. Semua kondisi diatas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap sesuatu lembaga keuangan untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian materi ataupun non materi.<sup>64</sup>

### 3. Tipe Risiko

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan perlu memahami tentang tipe-tipe risiko dengan seksama, dari sudut pandang akademisi ada banyak tipe risiko namun secara umum risiko dikenal dalam 2 tipe yaitu, risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*).

- a. Risiko Murni (*pure risk*), risiko ini dapat dikelompokkan pada 3 tipe risiko yaitu,

- 1) Risiko aset fisik, merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi.

---

<sup>64</sup> Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.8.

- 2) Risiko karyawan, merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.
- 3) Risiko legal, merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian.

b. Risiko Spekulatif (*speculative risk*), risiko ini dapat dikelompokkan pada 4 tipe risiko yaitu,

- 1) Risiko pasar, merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.
- 2) Risiko kredit, merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi keajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat.
- 3) Risiko likuiditas, merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara cepat.
- 4) Risiko operasional, merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

#### 4. Mengelola Risiko

pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu ;<sup>65</sup>

##### a. Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.

##### b. Mengalihkan risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian.

##### c. Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi.

##### d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (reserve) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari.

---

<sup>65</sup> Ibid.h.10.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nadirsyah Hawari, 2010.
- Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah Juz II*. Mesir: Tiariyah Qubra, 2000.
- Abu Hazam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Pustakaank Fakultas Hukum UII, 1990.
- Al-Imam Jalaludin Muhammad, et. Al., *Tafsir Jalalain*. Surabaya: PT. Elbah Mandiri Sejahtera.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Amirudin dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asad Muhammad, *The Message of the Quran*. Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985.
- Ashshofa Burhan. "Metode Penelitian Hukum." Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renasian, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemahan Bulughul Maram*. Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Hidayat Arif, Asri Jumaidi. "Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah Dan Musaqah," 2016.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Adilatil Ahkam*. Surabaya: Daarun Nasyr Al-mishriyah.

Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Irham Fahmi. *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kartono Kartini. "Pengantar Metodologi Riset Sosial." Bandung : Mandar Maju, 1986.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2019.

Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Edisi pert. Jakarta: PT. fajar Interpretama

- Mandiri, 2012.
- M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Neneng Nurhasanah, *Mudarabah`Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqiyyah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sattar. "Buku Ajar Pengantar Bisnis," 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung : pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Syaihk Al-alamah, Shalih Bin Muhammad Alu asy-Syakh, *Tafsir Muyassah*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

**Jurnal:**

Yeshambel Melese et.al., *Cooperation Under Encertainty: Assesing The Value Of Risk Sharing And Determining The Optimal Risk-Sharing Rile For Agents With Pre-Ecisting Business And Divernging Risk Attitudes*, International Journal Of Project Managent, Vol.VII, No 11, November 2016.

Charles Engel, *Policy Cooperation, Incomplete Markets and Risk Sharing*, University Of Wisconsin, October 2014

Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam*. Fakultas Syari’ah UIN RIL., Vol.XII, No.3, Juni 2015.

Maksum Muhammad. “Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah.” *Al-Adalah* XII, no. Jalan Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten (2014): 50.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

**Sumber online:**

Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://ktsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>, diakses 18 Februari 2021.

**Wawancara:**

Agus Sucipto, *Wawancara pemilik modal (shahibul maal)*, Desa Margo Bhakti, Tanggal 15 Mei 2021.

Angga, *Wawancara warga*, Desa Margo Bhakti, Tanggal 15 Mei 2021.

Endang, *Wawancara, pemilik modal (shahibul maal)*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

Kholis, *Wawancara warga*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

Fatimah, Siti, *Wawancara pemilik modal (shahibul maal)*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

Sudirman, *Wawancara pemilik modal (shahibul maal)*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

Sugeng, *Wawancara warga*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

Sutresno, *Wawancara pemelihara (mudharib)*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

Suwarno, *Wawancara pemilik modal (shahibul maal)*, Desa Margo Bhakti Tanggal 15 Mei 2021.

### **Skripsi**

Siti Badriyah, Skripsi, *Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN 2018.

Siti Aminah, Skripsi, *Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN 2017.

